



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KETIMPANGAN SOSIAL DI DESA KOTO TUO KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Lara Mardiana Rosa

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:rsaputrayosi@gmail.com

ABSTRACT

Social inequality is a condition where there is inequality in community life in various aspects. This condition can also be analogous to the existence of a gap between the upper social class and the lower social class. The purpose of this study is to analyze village government policies in overcoming social inequality in Koto Tuo Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a survey research type, with a descriptive explanatory level, using qualitative data analysis. This research includes field research. This study uses the Purposive Sampling technique. The data collection techniques in this study are interview, observation, and documentation methods. Data analysis uses data reduction steps, data presentation and conclusions. The result of this study, namely the Village Government's Policy in Overcoming Social Inequality in Koto Tuo Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, was carried out quite well and in a targeted manner.

Keywords: Analysis, Policy, Inequality

ABSTRAK

Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek. Kondisi tersebut juga dapat dianalogikan dengan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas sosial ke atas dengan masyarakat kelas sosial ke bawah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam mengatasi ketimpangan sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tahun. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi



deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan cukup baik dan terarah.

Kata Kunci : Analisis, Kebijakan, Ketimpangan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa : “pemerintah desa adalah kepala desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah”.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat merespons persoalan ketimpangan ini. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa seharusnya mampu mengelola sumber daya lokal dan merumuskan program-program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, pada kenyataannya, tidak semua kebijakan desa mampu secara efektif menyentuh akar persoalan ketimpangan sosial. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil cenderung bersifat umum, kurang partisipatif, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan masyarakat miskin. Kebijakan ini biasanya pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas masyarakat, penyediaan fasilitas dan infrastruktur desa, serta perluasan akses terhadap pelayanan publik. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah desa berupaya mengurangi jurang ketimpangan yang ada, memberikan kesempatan yang setara kepada semua warga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa mampu mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan, implementasi, serta dampak dari kebijakan desa dalam mengatasi ketimpangan sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.



Meskipun berbagai program dan kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah desa, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan yang nyata di masyarakat desa. Ketimpangan ini tercermin dari perbedaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Misalnya, sebagian warga menikmati bantuan sosial secara rutin, sementara kelompok lain yang juga membutuhkan justru tidak terdata sebagai penerima. Selain itu, akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kedekatan dengan aparat desa.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Terdapat pula indikasi bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada data dan partisipasi masyarakat, yang akhirnya berkontribusi pada kesenjangan sosial yang semakin melebar. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan judul : “Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah : **“Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian administrasi publik.

1.4.2 Aspek praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Koto Tuo.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi Negara diartikan sebagai mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang juga disebut birokrasi. Pusat perhatian administrasi administrasi Negara dalam hal ini adalah mekanisme negara ke dalam (administrasi internal). Administrasi Negara dalam hubungan ini adalah administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan merupakan implementasi peraturan yang mengatur pemerintahan pada tiap asas pemerintahan.



Menurut Dr. Sondang Siagian (dalam Marwiyah, 2022;1) administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga dengan Herbert A. Simon (dalam Pasolong, 2017;3) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, yang dengan kodratnya tersebut maka ia tidak bisa hidup tanpa bantuan sesamanya. Kebutuhan bermasyarakat dari manusia adalah suatu naluri yang diwariskan secara biologis. Maka manusia melakukan kerjasama, dan bergabung dalam kelompok-kelompok yang dapat memperjuangkan dan memenuhi kebutuhannya. Chris Argyris (dalam Aromatica, D&A, 2021;5) menyatakan bahwa organisasi-organisasi biasanya dibentuk orang guna mencapai sasaran-sasaran yang dapat dicapai terbaik secara kolektif.

Organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi yang didalamnya ada pembagian tugas, ada komunikasi antar satu anggota dengan yang lain, dan sesuatu yang tidak dihilangkan adalah adanya tujuan yang ingin dicapai. Gibson, Ivancevich dan Donelly (dalam Nawawi, 2019;74) mendefinisikan bahwa organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri dari setidaknya dua orang dan berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran tertentu.

2.1.3 Teori/Konsep Kebijakan publik

Kebijakan publik bisa diartikan sebagai suatu hukum, ketika terdapat suatu isu yang menghambat dan mempengaruhi dalam kepentingan milik publik yang perlu diatur. Namun, bila kebijakan publik menjadi dasar hukum, maka harus ada berbagai pihak yang menyepakati untuk disusun dan ditetapkan.

Thomas R. Dye (dalam Ayuningtyas 2014: 8) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”.

2.1.4 Teori/Konsep Pembangunan Sosial

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang diharapkan menghasilkan perbaikan hidup masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas, maka setiap perubahan tersebut akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia.

Siagian (dalam Mulyadi M, dkk, 2015;7) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian dari perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Tjokroamidjojo mendefinisikan pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik demi kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

2.1.5 Teori/Konsep Pemerintah Desa



Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Widjaja, (2014;3) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.

2.1.6 Teori/Konsep Ketimpangan Sosial

Menurut Andrinof A. Chaniago ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek social. Selanjutnya Budi Winarno mendefinisikan ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Roichatul Aswidah menambahkan ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Sementara Menurut Jonathan Haughton & Shahidur R. Khandker ketimpangan social adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. (Widiningsih. 2020;4).

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2024



2.3 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

1. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan pendapatan nasional suatu negara atau daerah dalam periode tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam periode tertentu.
3. Tingkat pendidikan merujuk pada capaian pendidikan formal yang berhasil diraih oleh individu, biasanya dinyatakan dalam jenjang pendidikan seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

2.4 Konsep Operasional

No	Judul	Indikator	Sub-Indikator	Item Penelitian
1	Analisis Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial	1. Pertumbuhan ekonomi	1. Kapasitas manusia 2. Pendapatan per kapita 3. Kesejahteraan penduduk	1. Ordinal
		2. Tingkat pengangguran	1. Inflasi 2. Keterbatasan keterampilan 3. Lapangan pekerjaan	1. Ordinal
		3. Tingkat pendidikan	1. Jenjang Pendidikan 2. Kompetensi	1. Ordinal

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survei dengan tingkat eksplanasi deskriptif, dengan menggunakan analisa data kualitatif.

3.2 Informan

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

No	Informan	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Desa	1	11%
2.	Sekretaris Desa	1	11%
3.	BPD	2	22%
4.	Masyarakat	5	56%



	TOTAL	9	100%
--	--------------	----------	-------------

Sumber : Data Olahan 2025

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil/didapat langsung dari sumber data. Perolehan data secara langsung ini, misalnya melalui survey, wawancara dan observasi. (Alfatih, 2014;35).

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data tidak didapat secara langsung dari sumber data. Biasanya diperoleh dengan cara mencata atau memfoto dari hasil laporan, jurnal, arsip dan dokumen lainnya. (Alfatih, 2014;35).

3.4. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. (Usman dkk, 2017;92).

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan cenderung merupakan data sekunder. (Usman dkk, 2017;106). Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

3.6.3 Observasi

S. Margono (Ismail, 2019;173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.

3.6.4 Triangulasi



Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong (Ismail, 2019:203) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

3.7.1 Reduksi Data (*reduction data*).

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

3.7.3 Penarikan Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan informan, kebijakan pemerintah desa telah menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui program peningkatan kapasitas manusia dengan dampak nyata pada peningkatan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Desa Koto Tuo aktif mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pemeliharaan hewan ternak milik desa oleh masyarakat yang berupa kerbau dan kambing. Program ini dilakukan dengan sistem bagi hasil, hasil ternak dijual atau dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagian hasilnya dikembangkan kembali. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan peternak kecil, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Pemerintah Desa juga menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. BLT DD disalurkan secara rutin kepada keluarga kurang mampu sesuai data hasil verifikasi lapangan. Masyarakat mengakui bahwa bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan pokok. Penyaluran dilakukan secara transparan dan melibatkan tokoh masyarakat dalam verifikasi data penerima, sehingga meminimalisir konflik sosial.

Namun, kebijakan ini tentunya tidak sepenuhnya dapat mengatasi kesenjangan. Ketimpangan sosial masih tetap ada terutama pada kelompok-kelompok rentan, dikarenakan akses dan manfaat belum merata. Diperlukan adanya strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berfokus pada pengurangan kesenjangan antara kelompok masyarakat.



Indikator Tingkat Pengangguran

Berdasarkan wawancara dengan informan, dalam upaya menekan angka pengangguran di desa, Pemerintah Desa Koto Tuo telah menerapkan beberapa program utama, yakni kebijakan padat karya dan pelatihan keterampilan kerja. Program padat karya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa difokuskan pada kegiatan pembangunan infrastruktur ringan seperti perbaikan jalan desa, irigasi, dan sanitasi lingkungan. Kegiatan ini bersifat sementara namun mampu menyerap tenaga kerja dari kelompok rentan seperti petani tidak tetap, buruh harian, dan pengangguran musiman. Dampak positifnya yaitu, memberikan pendapatan langsung kepada masyarakat miskin dan meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Namun, program ini bersifat jangka pendek dan belum mampu memberikan solusi struktural terhadap pengangguran jangka panjang.

Pemerintah desa juga telah menyelenggarakan program pelatihan keterampilan yaitu kursus menjahit. Program ini dilakukan dengan menggandeng Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) lokal. Pelatihan ini mampu meningkatkan keterampilan individu dan berpeluang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Akan tetapi, kurangnya pendampingan pasca-pelatihan menyebabkan keterampilan yang diperoleh belum optimal dimanfaatkan untuk membuka usaha mandiri.

Indikator Tingkat Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan informan, Pemerintah Desa Koto Tuo selalu berupaya meningkatkan jenjang pendidikan dan kompetensi masyarakat desa melalui sosialisasi akan pentingnya pendidikan tinggi, dan juga menyediakan bantuan sekolah untuk anak-anak dikalangan masyarakat kurang mampu dan berprestasi. Program bantuan sekolah dari pemerintah desa merupakan langkah positif dalam mengurangi ketimpangan sosial, karena memberikan kontribusi dalam mempersempit kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Namun, masih diperlukan pemerataan akses, peningkatan anggaran pendidikan, dan pengawasan distribusi bantuan agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa dalam Mengatasi Ketimpangan Sosial di Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terlaksana dengan cukup baik dan terarah.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
2. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan



- kebutuhan lokal.
3. Penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.
 4. Dengan penerapan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada keadilan sosial, diharapkan ketimpangan yang terjadi di desa dapat ditekan secara signifikan, sehingga tercipta masyarakat desa yang lebih sejahtera, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfatih Andy. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Sosial*. Palembang. Universitas Sriwijaya
- Aromatica, D&A. 2021. *Teori Organisasi*. Jawa Tengah. CV. Amerta Media
- Ayuningtyas, D. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Kesehatan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Igirisa. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. Jogjakarta. Tanah Air Beta
- Ismail. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media Sahabat Cendekia
- Jaelani. 2019. *Teori Organisasi*. Semarang. Yayasan Prima Agus Teknik
- Krisnandi, dkk. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta Selatan. LPU-UNAS
- Kusuma D. S. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Jogjakarta. Samudra Biru
- Marwiyah Siti. 2022. *Buku ajar Kebijakan Publik*. Probolinggo. Universitas Panca Marga
- Marwiyah Siti. 2020. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Probolinggo. Universitas Panca Marga
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Sulawesi. Unimal Press
- Mulyani, T. 2016. *Ketimpangan Sosial di Indonesia: Perspektif Interaksionisme Simbolik*. Jurnal Komunikasi Sosial, 4(1), 51-68
- Mulyadi M, dkk. 2015. *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jakarta. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
- Nurdin Ismail, Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya. Media



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sahabat Cendekia

Nuraini, dkk. 2019. *Modul ketimpangan sosial sebagai dampak Perubahan sosial ditengah globalisasi*. Lampung. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nawawi. 2019. *Manajemen Pemerintahan*. Depok. Rajagrafindo Persada

Pasolong. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

Pertiwi. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Bandung. Pustaka Ramadhan.

Sahir, SH. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta. KBM INDONESIA

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metodologi penelitian*. Bandung. Alfabeta.

Suyanto, dkk. 2022. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. Kencana

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (12th ed.). New York: Pearson.

Ummul Mustiqowati. 2021. *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Pekanbaru. Irdev Riau

Usman, dkk. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara

Warsono, dkk. 2019. *Buku Ajar Teori Administrasi*. Semarang. Universitas Diponegoro

Widiana. 2020. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Jawa Tengah. CV. Pena Persada

Widiningsih. 2020. *Modul Sosiologi Ketimpangan Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial Ditengah Globalisasi*. Bekasi. Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN

Widjaja. 2014. *Otonomi Desa Meupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Depok. Rajagrafindo Persada

Jurnal:



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sari, D. 2017. *Otonomi Desa dan Pembangunan Desa Mandiri*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 110-125.

Sari, R. P., & Widiastuti, N. 2019. *Ketimpangan Sosial Ekologis di Indonesia: Perspektif Sosial Ekologi*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 10(1), 12-27.

Setiawan, M. 2017. Stratifikasi Sosial dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Sosiologi Indonesia, 6(2), 120-134.

Susanto, B. 2020. Ketimpangan Sosial Ekonomi dalam Perspektif Teori Konflik di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 45-61.

Suwandi, S. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa: Sebuah Pendekatan Partisipatif*. Jurnal Pengembangan Masyarakat, 12(3), 82-96.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Aparatur Desa

Lembaga/Organisasi:

Badan Pusat Statistik. (2022). Indikator Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: BPS.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021/22*. Paris: UNESCO.